

BAB I

PENDAHULUAN

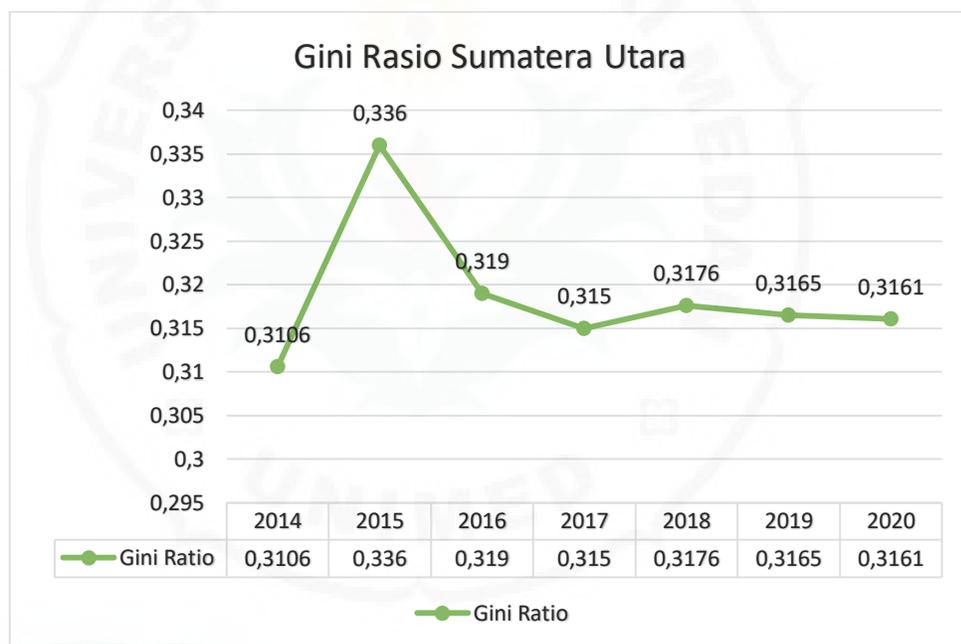
1. 1 Latar Belakang

Untuk mengentaskan Ketimpangan Pendapatan, setiap negara pasti akan berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Disparitas atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat dengan pendapatan tinggi dan mereka yang berpenghasilan kecil adalah dua persoalan paling umum yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meskipun titik fokus kita hanya persoalan ketidakmerataan penyaluran pendapatan dan harta kekayaan (assets), hal tersebut hanyalah merupakan bagian kecil dari persoalan ketidakmerataan yang ada di negara sedang berkembang (Lincolin Arsyad, 2016). Pada dasarnya ketidakmerataan terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya ketidakmerataan kepuasan kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih dan lain lain.

Ketimpangan penyaluran pendapatan ialah persoalan disparitas pendapatan antara wilayah dengan masyarakat maju dan wilayah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula perbedaan penyaluran pendapatan yang berujung pada ketimpangan pendapatan. Ini tidak dapat dihindari karena efek trickle-down kekuatan penuh. Hasil produksi dalam negeri hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil minoritas dengan tujuan tertentu (Musfidar, 2012)

Ketimpangan pendapatan dapat didorong oleh banyak Hal, baik di dalam maupun di luar daerah itu sendiri. Ketimpangan pendapatan didorong oleh beberapa aspek, termasuk: Tingkat kemiskinan di suatu daerah, Indeks Pembangunan manusia, mobilitas aspek produksi barang dan jasa, perbedaan demografis, alokasi investasi, dan terhambatnya perdagangan.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.21 Grafik Tingkat Ketimpangan Pendapatan Sumatera Utara 2014-2020

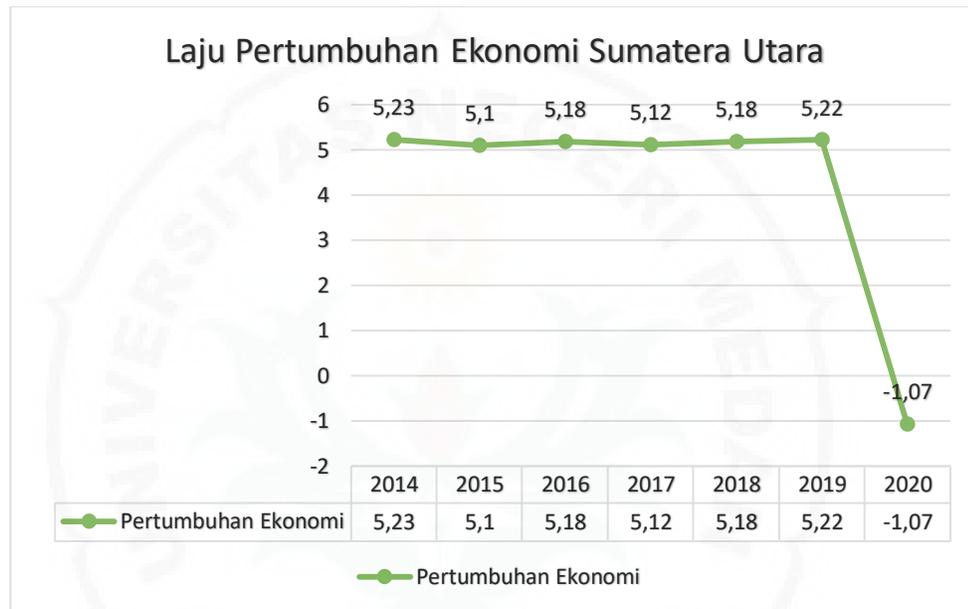
Di Gambar 1.1 gini ratio Sumatera Utara pada tahun 2014 tertulis d 0,3106 dan tertinggi di rentang waktu 2014-2020. Selama tahun 2014 sampai tahun 2020, nilai gini ratio cukup labil. Periode selanjutnya tahun 2016 turun hingga mencapai 0,3190 juga di tahun 2017 turun menjadi 0,3150, lalu terjadi kenaikan balik pada

tahun 2018 mencapai 0,3176, namun di tahun 2019 turun menjadi 0,3165 dan selanjutnya tahun 2020 turun tipis di tengah pandemi menjadi 0,3161.

(Todaro, 2004) Menyatakan bahwa ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu suatu wilayah yang kurang maju dan berkembang akan terdorong untuk melakukan perbaikan sekaligus berkembang dalam persaingan dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraan wilayah yang kurang maju tersebut. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Banyak faktor- faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan antara lain ialah Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Seperti yang dikemukakan oleh Kuznets tentang hubungan antara disparitas dan pendapatan perkapita. Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan akan tinggi ketika periode awal pertumbuhan ekonomi tetapi akan cenderung membaik seiring dengan terjadinya pembangunan pada periode berikutnya atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis U terbalik (Nursaid, 2020). Pertumbuhan Ekonomi diperhitungkan untuk membantu dalam pengembangan kebijakan atau rencana daerah. Karena semakin tinggi pendapatan masyarakat setempat, maka potensi sumber pendapatan daerah meningkat secara proporsional dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dapat dikatakan bahwa

penduduk suatu daerah semakin sejahtera semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Sumatera Utara
2014-2020

Dapat dilihat grafik diatas menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menurut Atas Harga Konstan setiap tahunnya, terkecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan dikarenakan situasi krisis kesehatan atau pandemi Covid-19. Misalnya di tahun 2020 laju pertumbuhan di Sumatera Utara minus yaitu 1,07 persen sedangkan di tahun tahun sebelumnya laju pertumbuhan tertinggi ada di tahun 2019 sekitar 5,22 persen. Jika dilihat di beberapa kota/kabupaten di Sumatera Utara, di tahun 2020 mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan bahkan sampai minus, misalnya kota Medan di tahun 2020 laju

pertumbuhan turun menjadi -1,98 persen yang di tahun sebelumnya cenderung stabil bahkan di tahun 2016 tingkat pertumbuhan 6,27 persen. Begitu juga dengan kabupaten nias, meski terdampak covid tetapi laju pertumbuhan tetap positif sekitar 1,8 persen, memang kabupaten ini pergerakan ekonominya mayoritas di topang oleh sektor agraria dan juga perikanan. Tetapi jika di lihat tahun-tahun sebelum covid memang laju pertumbuhan ekonomi di sumatera utara cenderung stabil.

Masuk akal bahwa ketimpangan pendapatan akan menurun jika pendapatan disalurkan secara luas dan merata di seluruh wilayah. Para ekonom neo klasik mengemukakan, dalam tahap awal pertumbuhan, ketimpangan pendapatan antar daerah cenderung berkurang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura. Kelompok neoklasik optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan (Tirmidzi, 2012)

Disamping karena pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan oleh kemiskinan. Menurut Miller dalam (Arsyad, 2006) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi, kemiskinan bukan hanya masalah sosial juga berasosiasi dengan kepunyaan terhadap produksi, produktivitas, tingkat pembangunan masyarakat, dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara 2014-2020

Berdasarkan grafik diatas, tingkat perkembangan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2014-2020 selalu terjadi penurunan. Perkembangan kemiskinan yang menurun kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara timpang dan menurun secara signifikan, beberapa daerah ada yang penurunannya tajam dan ada pula yang stagnan di posisi tersebut. Kota Deli Serdang misalnya memiliki tingkat kemiskinan terendah dalam periode tahun 2014-2020 dengan

persentase 4,35 terendah di Sumatera Utara disusul Kabupaten Binjai dan Kabupaten Padang sidempuan dengan persentase 6,28 dan 7,95. Sedangkan Kabupaten Nias Utara memiliki rata-rata tingkat kemiskinan yang tinggi. Perbedaan taraf kemiskinan pada beberapa daerah di Sumatera Utara inilah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota.



Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambar 1.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara 2014-2020

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Becker dalam (Ginting, 2020) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori

human capital, yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas perorangan.

Kemajuan pembangunan jangka panjang dapat diketahui dengan bantuan alat ukur IPM. Menandakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga diketahui sebagai Human Development Index (HDI), berkembang dengan baik di seluruh kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari grafik diatas, Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari periode 2014-2020 dari Kategori “sedang” ke “tinggi”. Dapat dilihat di Juga dari sisi usia harapan hidup mencapai dimana mengalami kenaikan dari tahun 2014-2020 dimana harapan hidup tahun 2015 hanya 68,29 di tahun 2020 mengalami kenaikan 69,1. Dari sisi pengeluaran perkapita pertahun juga mengalami peningkatan dari 2015 sekitar Rp, 9,5 Juta di Tahun 2020 mencapai Rp 10,42 juta dan harapan sekolah di tahun 2020 menyentuh 13,23 tahun.

Kesehatan, edukasi, dan taraf hidup merupakan tiga parameter yang dapat dijadikan sebagai komposisi untuk membuat perbedaan pengukuran IPM. Ketiga parameter tersebut saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan ketiga parameter tersebut dalam rangka meningkatkan IPM, serta aspek penyokong lainnya seperti kesempatan kerja, infrastruktur, dan perluasan

ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, ditemukan masalah-masalah berikut :

1. Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Berfluktuasi, banyak daerah yang memiliki ketimpangan yang berbeda
2. Ketimpangan Pendapatan yang tinggi mencerminkan kondisi perekonomian yang kurang baik.
3. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami fluktuasi dan menurun cukup drastis pada tahun 2020.
4. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menghambat aktivitas perekonomian sehingga mengakibatkan Ketimpangan Meningkat.
5. Kemiskinan mengalami penurunan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya.
6. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami Kenaikan

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang perlu dikerjakan. Hal ini selaras dengan pandangan (Sugiyono, 2017) yang menyatakan bahwa rumusan masalah ialah pertanyaan penelitian berbasis masalah yang perlu diselesaikan melalui pengumpulan data. Sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara antar Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh Pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimanakah Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara antar Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh Kemiskinan?
3. Bagaimanakah ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?
4. Bagaimanakah ketimpangan pendapatan antara kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan IPM secara bersama-sama?

1.4 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah, (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa karena keterbatasan tenaga, keuangan, waktu, dan untuk lebih memperhatikan hasil penelitian, peneliti tidak meneliti seluruh objek atau situasi tertentu, tetapi menentukan fokus. Oleh karena itu penulis membatasi masalah menjadi :

1. Objek penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2020
2. Penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan, yaitu bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2020

1.5 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang perlu dikerjakan. Hal ini selaras dengan pandangan (Sugiyono, 2017) yang menyatakan bahwa rumusan masalah ialah pertanyaan penelitian berbasis masalah yang perlu diselesaikan melalui pengumpulan data. Sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun
2. Mengkaji pengaruh Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun
3. Mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, dan IPM secara berbarengan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian:

Hasil dari penelitian kira-nya nanti bisa memberikan benefit sebagai berikut:

1. Terhadap Akademisi

- a. Memperluas pandangan terhadap sektor ekonomi terutama terkait disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan partisipasi untuk menambah *knowledge* juga meningkatkan kualitas edukasi.
- c. Sebagai landasan untuk penelitian berikutnya.

2. Terhadap Pemangku Jabatan

Untuk pemerintah kabupaten/kota khususnya di Sumatera Utara, agar Penelitian dapat menjadi landasan dalam mengarah pada proses peningkatan pendapatan daerah dan mengentaskan kemiskinan.

3. Terhadap Peneliti

Sebagai tempat agar dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan pada perkuliahan dan meningkatkan pemahaman serta pandangan yang luas mengenai ketimpangan pendapatan.